

INTISARI

PERAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH DALAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP NOTARIS YANG DIJATUHI PIDANA PENJARA

Ayu Puspita¹ Supriyadi²

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan Majelis Pengawas Daerah dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris yang dijatuhi pidana penjara yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun dan perlindungan terhadap Protokol Notaris yang telah dibuat Notaris yang dijatuhi pidana penjara yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer lapangan atau terhadap masyarakat, yang bersifat penelitian deskriptif memberikan data yang seteliti mungkin, pengumpulan data melalui studi dokumen dan penelitian lapangan. Analisis data yang diperoleh dari hari penelitian dilakukan dengan metode kualitatif, penyajian hasil yang digunakan dalam penelitian ini merupakan deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah. *Pertama*, Majelis Pengawas Daerah tidak dapat melakukan pembinaan dan pengawasan dengan efektif terhadap Notaris yang dijatuhi pidana kurang dari 5 tahun karena sebelumnya tidak adanya laporan dari masyarakat, Majelis Pengawas Daerah hanya dapat memastikan bahwa Notaris yang bersangkutan tidak mengeluarkan akta dari hasil laporan bulanan, pada pemeriksaan tahunan Majelis Pengawas Daerah tidak melakukan pemeriksaan protokol Notaris yang dipidana kurang dari 5 tahun karena dalam pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah mewajibkan Notaris hadir dalam pemeriksaan. *Kedua*, protokol notaris yang dijatuhi pidana penjara kurang dari 5 tahun tidak melakukan penyerahan protokol notaris, protokol notaris hanya disimpan dan dipelihara oleh pegawai kantor notaris yang dipidana kurang dari 5 tahun sehingga Majelis Pengawas Daerah dapat memberikan perlindungan terhadap klien yang minta untuk dikeluarkan Salinan Akta, Kutipan Akta, dan *Grosse Akta* dengan cara mengangkat notaris pemegang protokol dari salah satu anggota Majelis Pengawas Daerah.

Kata Kunci : Majelis Pengawas Daerah, Protokol Notaris, Pidana Notaris

¹ Jalan Urip Sumoharjo Blok. N No. 1, Palembang, Sumatera Selatan, ayupuspita504@gmail.com

² Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

ABSTRACT

THE ROLE OF REGIONAL SUPERVISORY COUNCIL (MPD) IN IMPLEMENTING THE GUIDANCE AND SUPERVISION OF NOTARY THAT HAS SENTENCED TO PRISON

Ayu Puspita³ Supriyadi⁴

Research aim is to know and analyze the efforts made by the Regional Supervisory Council (MPD) in carrying out the guidance and supervision of the Notary who was sentenced to imprisonment punishable by imprisonment of less than 5 (five) years and the protection of the Notary's Protocol which has been made Notary who was obeyed imprisonment punishable by imprisonment of less than 5 (five) years.

The type of this research is used empirical legal research which is initially studied is secondary data then continued with research on primary data in field or society, which is descriptive research give data as fast as possible, data collecting through document study and field. Analysis of data obtained from the day of research conducted by qualitative methods, the presentation of results used in this study is descriptive qualitative.

Result of this research is. *Firstly*, Regional Supervisory Council (MPD) can not conduct effective guidance and supervision over a Notary who has been sentenced to less than 5 years because previously there was no report from the community, Majelis Pengawas Daerah can only ensure that the Notary concerned does not issue a deed of the monthly report, Regional Supervisory Council (MPD) shall not conduct the examination of the Notary's protocol which shall be sentenced to less than 5 years because in the examination the Notary shall be present. *Secondly*, the notary's protocol sentenced to imprisonment of less than 5 years does not transmit the notary protocol so that Regional Supervisory Council (MPD) may provide protection to the client who requested to be issued Duplicated Deed, Quotation Deed and *Grosse Deed* by appointing notary holder of the protocol from one of the members of the Regional Supervisory Council (MPD).

Keywords :Regional Supervisory Council (MPD), Notary's Protocol, Notary's criminal

³ Jalan Urip Sumoharjo Blok. N No. 1, Palembang, Sumatera Selatan, ayupuspita504@gmail.com

⁴ Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada